

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi adalah kegiatan memindahkan orang, barang dan/atau jasa dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi juga merupakan sektor penting dan strategis untuk mendukung berfungsinya perekonomian dan pembangunan negara. Terciptanya transportasi, setiap distribusi orang, barang dan/atau jasa dapat berlangsung. Oleh karena itu, transportasi harus dilaksanakan secara terkelola, terpadu dan berkelanjutan serta dilaksanakan secara profesional agar mampu menggerakkan orang dan barang serta memiliki hasil khususnya di bidang transportasi jalan. Maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk moda transportasi jalan (kendaraan bermotor) untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Sementara itu, kendaraan dinilai sangat penting untuk menunjang aktivitas apapun. Kendaraan merupakan sarana pengangkut yang harus mendapat perhatian khusus. Hal ini karena, dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor apabila kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian yang penting maka akan mengalami kecelakaan. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Peraturan Menteri perhubungan No 19 Tahun 2021). Pengujian Kendaraan Bermotor memegang peranan penting dalam memeriksa apakah kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada saat beroperasi.

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat yang dihimpun pada bulan Agustus 2022, adapun untuk akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Indonesia berjumlah 329 UPUBKB (Tarma 2022). Dari data tersebut sebanyak 72 UPUBKB terakreditasi A, 206 UPUBKB terakreditasi B, 18 UPUBKB terakreditasi bersyarat dan 33 lainnya terakreditasi C. Sementara pada Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah dijelaskan terkait aturan akreditasi UPUBKB.

Tata letak fasilitas memiliki arti yaitu tata cara dalam mengatur fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk menunjang kelancaran dalam proses produksi. Pengaturan fasilitas ini memanfaatkan luas ruangan atau gedung untuk menempatkan fasilitas produksi. Penempatan tata letak yang baik memberikan pengaruh yang signifikan pada kelancaran suatu proses produksi. Selain berpengaruh pada kelancaran suatu produksi penempatan, tata letak juga membuat proses menjadi cepat. Penempatan tata letak yang tepat dapat meningkatkan efisiensi waktu, meminimalisir kecelakaan kerja, dan memberikan kenyamanan pada petugas dalam melakukan proses produksi (Mustafa, 2008).

Penempatan tata letak harus disesuaikan dengan tujuan dari pembangunan gedung itu sendiri, paling tidak sesuai dengan standar minimal sarana gedung uji. Standar untuk menentukan apakah tata letak di gedung uji cocok untuk dijadikan acuan, perlu memperhatikan beberapa hal seperti efisiensi waktu, kenyamanan, dan pelayanan. Diperlukan standar yang telah ditentukan untuk menunjang kelancaran proses pengujian, seperti tata letak alat. Melalui adanya standar inilah penempatan alat uji memiliki sebuah nilai lebih dan membuat kenyamanan pada kualitas pelayanan pada masyarakat (Faishol et al., 2013).

Pada Pengujian Kendaraan Bermotor di Indonesia penempatan tata letak peralatan uji berbeda-beda. Seperti yang ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten dan Kota Mojokerto memiliki penempatan tata letak uji yang berbeda-beda dengan penempatan untuk uji kolong yang ada di Kabupaten Mojokerto berada didepan sedangkan di Kota Mojokerto berada dibelakang. Dari penempatan tersebut terdapat perbedaan waktu dan pelayanan dalam proses pengujian. Perancangan tata letak meliputi penetapan tata letak fasilitas operasional dengan menggunakan ruang yang tersedia untuk penempatan alat uji, mesin, dan semua peralatan yang digunakan selama pengujian. Penggunaan ruangan akan efisien jika alat uji atau fasilitas lainnya diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan jarak minimum antara alat uji dengan peralatan lainnya.

Penataan fasilitas pengujian yang baik memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pengujian karena secara langsung mempengaruhi

kelancaran proses pengujian, yang dapat mempersingkat waktu pengujian, memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi penguji.

Berlandaskan dengan permasalahan tersebut, maka penulis menyusun Kertas Kerja Wajib yang berjudul "STANDARDISASI TATA LETAK PERALATAN UJI DI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR" yang nanti bisa dijadikan sebagai standar acuan tata letak alat uji oleh pemerintah pada Pengujian Kendaraan Bermotor di Indonesia.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah yang akan dikaji:

1. Bagaimana tata letak (*layout*) alat uji kendaraan disetiap Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di Jakarta?
2. Bagaimana standardisasi tata letak alat uji kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimana usulan dan rekomendasi yang paling optimal terkait kondisi peralatan uji di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor?

I.3 Batasan Masalah

Adapun penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal meliputi:

1. Penelitian dilakukan di Pengujian Kendaraan Bermotor wilayah Jakarta (UPPKB Cilincing, UPPKB Jagakarsa, UPPKB Pulogadung, UPPKB Kedaung Angke, UPPKB Ujung Menteng).
2. Layout diperuntukkan untuk Kendaraan dengan JBB maksimum 12.000 kilogram (kg).
- 3.

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengetahui tata letak alat uji di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di Jakarta.
2. Untuk mendapatkan standardisasi tata letak alat uji kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.

3. Memberikan usulan dan rekomendasi yang paling optimal terkait tata letak alat uji di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini dapat diuraikan menjadi dua kategori, antara lain:

1. Manfaat bagi penulis
 - a. Sebagai salah satu sarana belajar dalam rangka menambah wawasan untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Mengetahui secara langsung kondisi sebenarnya pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Indonesia.
 - c. Memahami mekanisme dan prosedur pelayanan serta persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor secara administrasi dan pelaksanaan pengujian mekanis.
 - d. Mengerti dan memahami pentingnya penempatan tata letak alat uji dalam meningkatkan pengujian yang efektif dan efisien.
2. Manfaat bagi pembaca
 - a. Memperoleh ilmu pengetahuan baru mengenai mekanisme di Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. Memperoleh informasi mengenai pelayanan yang ada di Pengujian Kendaraan Bermotor.

I.6 Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini, penulis menggunakan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan landasan teori yang disertakan guna mendukung penelitian. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai penelitian yang pernah dilakukan, dimana saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode penelitian, pengambilan dan pengumpulan data, *flowchart* alur penelitian, dan analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjabaran tentang proses yang dilakukan selama pengambilan dan pengolahan data, maupun hasil dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil oleh peneliti setelah melakukan penelitian, kemudian memberikan saran yang perlu dilakukan kedepannya.